

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DI DESA GUHA KECAMATAN
BATUMANDI KABUPATEN BALANGAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1)
pada Program Studi Administrasi Publik



OLEH

NURUL AZKIA

NPM : 2022488

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)

AMUNTAI

2026

TANDA PERSETUJUAN

Mahasiswa yang telah disetujui skripsinya :

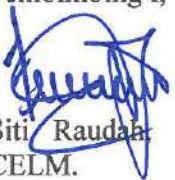
NAMA : NURUL AZKIA

NPM : 2022488

PROGRAM : ADMINISTRASI PUBLIK

JUDUL : **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA GUHA KECAMATAN BATU MANDI KABUPATEN BALANGAN** Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujui untuk diajukan dan dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Pembimbing I,


Siti Raudah, S.Sos, M.A.P., CHCM,
CELM.
NUPTK. 5733766667230302

Amuntai, 09 Februari 2026

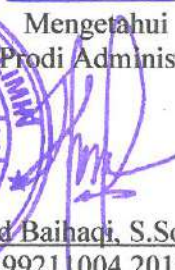
Pembimbing II,


Mohammad Fajar Noorahman, M.Psi.
NUPTK. 7933769670130322



Mengetahui

Plt. Ketua Prodi Administrasi Publik,


Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A
NIK. 19921 004 201509 021

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Tidak lupa sholawat dan salam senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Berkat limpahan dan Rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Guha Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan”**. Skripsi ini disusun dalam rangka untuk meraih gelar S1 pada Program Studi Administrasi Publik Dalam proses penyusunan Skripsi ini, penulis banyak mendapatkan sumbangan pikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Reno Affrian, S.Sos.,M.AP., CIQnr selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Admiistrasi (STIA) Amuntai.
2. Ahmad Baihaqi, S.Sos, MA. selaku Plt. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
3. Siti Raudah, S.Sos, MAP. CHCM, CELM. selaku dosen pembimbing I yang bersedia meluangkan waktu ditengah kesibukan dan memberikan arahan dalam proses penulisan skripsi.
4. Moh. Fajar Noorrahman, M.Psi selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan kritik, saran, dan pengarahan selama proses penulisan skripsi.
5. Seluruh dosen besera staf tata usaha beserta jajaran yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Administasi (STIA) Amuntai
6. Kepala Desa, Aparatur Desa dan Masyarakat Desa Guha Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan yang turut serta memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam permasalahan yang di teliti

7. Kedua orang tua, dan sahabat yang sudah memberi semangat dan doa'anya dalam pembuatan skripsi ini
8. Serta teman-teman di STIA Amuntai yang turut membantu dan saling memotivasi hingga dapat menyelesaikan skripsi ini bersama-sama
9. Seluruh pihak yang terkait dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan, bimbingan, dan pengarahan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu segala kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah SWT jugalah penulis serahkan segalanya, semoga segala usaha yang sederhana ini bermanfaat bagi para pembaca, terutama bagi penulis.

Balangan, Februari 2026

Nurul Azkia

DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN	
PENUNJUKAN PENGUJI SKRIPSI	
PANGGILAN UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI	
BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI	
LEMBAR PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
MOTTO	
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hasil Penelitian Terdahulu.....	9
B. Tinjauan Teoritis	14
C. Kerangka Pemikiran	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Tipe Penelitian	37
D. Data dan Sumber Data	38
E. Desain Operasional Penelitian.....	42
F. Teknik Pengumpulan Data.....	43
G. Teknik Analisis Data	45

H. Uji Kredibilitas Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum	51
B. Hasil dan Pembahasan	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	131
B. Saran.....	132
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Informan Penelitian	41
Tabel 3. 2 Desain Operasional Penelitian.....	43
Tabel 4.1 Demografi Penduduk di Desa Guha Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan	54
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan di Desa Guha Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan	54
Tabel 4.3 Daftar Nama Anggota BPD Desa Guha Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan	58
Tabel 4.4 Daftar Nama Rukun Tetangga (RT) Desa Guha Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan	59
Tabel 4.5 Sarana Keinformasian Kesehatan di Desa Guha.....	68
Tabel 4.6 Tenaga Kesehatan di Desa Guha	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	35
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kantor Desa Guha	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan bersama, namun untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif diperlukan manajemen yang baik dan benar. Atas dasar tujuan tersebut, dirancanglah berbagai sumber daya yang diperlukan, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, teknologi, maupun mekanisme kerja yang ditempuh dalam mewujudkan tujuan organisasi. Dari berbagai faktor tersebut, faktor manusia merupakan elemen yang paling penting, karena manusialah yang mampu mengelola sumber daya lainnya. Pemerintah sebagai organisasi publik memiliki fungsi utama memberikan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan pembangunan, serta menjalankan administrasi pemerintahan.

Konteks pembangunan desa, partisipasi masyarakat merupakan aspek yang sangat penting. Pembangunan desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa semata, melainkan juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang turut menentukan arah pembangunan desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Dengan demikian, pembangunan desa yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta mencerminkan aspirasi bersama.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga menekankan bahwa

pembangunannasional dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Dengan demikian, masyarakat memiliki posisi penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan, termasuk di tingkat desa.

Jika dilihat dari sisi sumber daya yang ada, Desa Guha memiliki kekayaan berupa aset fisik dan non-fisik yang seharusnya dapat menunjang pembangunan desa apabila dikelola dengan baik serta melibatkan masyarakat.

1. Aset Fisik Desa Guha berdasarkan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI), antara lain:

- a. Gedung Taman Pendidikan Al-Qur'an (2016), Gedung Aset RT 003 (2016), Gedung Taman Pendidikan Al-Qur'an RT 002 (2019).
- b. Gudang Aset (2017–2019), termasuk Gudang Sound System RT 002.
- c. Gerbang Desa (2024) dan Gerbang Gang (2025).
- d. Lapangan Bola Volly (2019).
- e. Infrastruktur jalan berupa jalan usaha tani (JUT) dengan panjang bervariasi (misalnya JUT Panyiuran RT 01 sepanjang 280 m, JUT Lahung RT 03 sepanjang 300 m, dan lainnya).
- f. Jembatan desa di berbagai RT, misalnya Jembatan Canting RT 01 (2018), Jembatan Layung RT 01 (2017), Jembatan Binjai Manis RT 02 (2020), hingga Jembatan Ulin Tangang P 4m x L 2m (2024).

Aset fisik ini menunjukkan adanya dukungan infrastruktur yang cukup memadai, tetapi keberlanjutan pemanfaatannya sangat bergantung pada partisipasi masyarakat.

1) Aset Non-Fisik Desa Guha berupa kelembagaan sosial masyarakat, antara lain:

- a) PKK, Karang Taruna, Posyandu, Kelompok Tani, Kelompok Burdah, Kelompok Habsyi, dan Gaboksar

Kelembagaan ini berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang, baik sosial, keagamaan, ekonomi, maupun pelayanan publik.

Meskipun desa memiliki potensi yang besar baik dari sisi aset fisik maupun non-fisik, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Guha Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan hasil pengamatan dan informasi yang diperoleh, ditemukan beberapa fenomena sebagai berikut:

- (1) Rendahnya kehadiran dan keterlibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes).

Banyak masyarakat tidak hadir atau hanya menjadi pendengar pasif dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), sehingga aspirasi dan kebutuhan masyarakat belum sepenuhnya tersampaikan dalam pengambilan keputusan pembangunan.

- (2) Pelaksanaan program pembangunan masih didominasi oleh aparat desa.

Masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, baik dalam bentuk tenaga, ide, maupun pengawasan, sehingga masyarakat cenderung menjadi penerima manfaat pasif.

- (3) Partisipasi masyarakat dalam evaluasi dan pemeliharaan hasil pembangunan masih rendah.

Setelah pembangunan selesai, masyarakat kurang terlibat dalam kegiatan evaluasi maupun pemeliharaan sarana yang telah dibangun, seperti jalan desa dan fasilitas umum.

- (4) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tahapan perencanaan pembangunan.

Sebagian masyarakat belum memahami proses dan mekanisme perencanaan pembangunan desa, mulai dari tahap identifikasi masalah hingga penyusunan prioritas program. Akibatnya, masyarakat sulit memberikan usulan yang relevan dan kurang menyadari pentingnya keterlibatan mereka dalam perencanaan.

Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Desa Guha masih rendah pada berbagai tahapan pembangunan sebagaimana dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff, yaitu dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi. Rendahnya partisipasi ini berdampak pada kurang optimalnya hasil pembangunan, rendahnya rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan, serta lemahnya keberlanjutan program desa.

Pembangunan desa yang berhasil adalah pembangunan yang melibatkan masyarakat secara penuh, karena masyarakatlah yang akan menikmati hasilnya. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, akan tercipta rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap program pembangunan, sehingga masyarakat juga akan turut menjaga dan memelihara hasil

pembangunan tersebut. Sebaliknya, rendahnya partisipasi masyarakat dapat menyebabkan pembangunan desa tidak sesuai kebutuhan, kurang efektif, dan berpotensi menimbulkan masalah sosial baru.

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Guha Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan masih menghadapi tantangan berupa rendahnya keterlibatan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), kurangnya pemahaman terhadap tahapan perencanaan, serta adanya dominasi aparat desa maupun tokoh tertentu dalam pengambilan keputusan. Padahal, desa memiliki potensi berupa aset fisik dan non-fisik yang apabila dikelola dengan melibatkan masyarakat, dapat mendorong pembangunan desa yang lebih efektif, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga kondisi tersebut menjadi permasalahan penting yang perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat serta upaya yang dapat dilakukan guna meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.

Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan judul penelitian: **“Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Guha Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan.**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan untuk mempertegas ruang lingkup masalah yang akan dibahas, agar tidak menimbulkan luasnya penafsiran mengenai permasalahan dan pembahasan sehingga pokok permasalahannya terarah dan tidak menyimpang dari topik yang diangkat oleh peneliti. Penulis tertarik untuk meneliti dan memfokuskan pada permasalahan “Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Guha Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan”.

Maka dalam hal ini, Menurut Cohen dan Uphoff (dalam Hutagalung, 2022:12), untuk mengukur partisipasi masyarakat dapat dilihat dari empat hal berikut:

1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan
2. Partisipasi dalam Pelaksanaan
3. Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat
4. Partisipasi dalam Evaluasi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditemukan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian seperti dibawah ini :

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)des) di Desa Guha Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan?

2. Apa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)des di Desa Guha Kecamatan Batumandi Kabupaten?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)des) di Desa Guha Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan.
2. Untuk mengetahui apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Guha Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan

E. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan studi perbandingan selanjutnya dan dapat menjadi sumbangan pemikiran ilmiah, serta dapat melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut masalah perencanaan pembangunan desa.

2. Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi suatu masukan bagi pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan partisipasi masyarakat diberbagai bidang khususnya pada perencanaan pembangunan di Desa Guha Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Tita Fusvita (2020) dalam Penelitian yang berjudul ” **Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Simpang Bumbuan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan**”. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat bergantung kepada peranan pemerintah dan masyarakatnya. Permasalahan pada Desa Simpang Bumbuan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan masih kurang keikutsertaan masyarakat dalam proses sosialisasi dan kurang memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan pembangunan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Simpang Bumbuan Kecamatan tebing Tinggi Kabupaten Balangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan secara purposive sampling berjumlah 11 orang. Setelah data terkumpul kemudian di analisis dengan teknik meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data pada penelitian ini perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi,

analisis kasus negatif, dan mengadakan membercheck. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Simpang Bumbuan Kecamatan Tebing tinggi Kabupaten Balangan belum baik, hal ini dapat dilihat dari indikator : Pertama, pada aspek Partisipasi dalam Pembuatan Keputusan di ketahui pada indikator musyawarah banyak membuang waktu. Pada indikator penyampaian pendapat aspirasi tidak memberikan sumbangan pemikiran. Kedua, pada aspek Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan di ketahui pada indikator memberikan sumbangan berbentuk uang murni dari dana Desa. Pada indikator memberikan sumbangan dalam bentuk barang peralatan masyarakat memberikan bahan atau barang Pada indikator memberikan sumbangan dalam bentuk tenaga masyarakat antusias berpartisipasi. Ketiga, pada aspek Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi di ketahui pada indikator mengawasi pembangunan adanya kegiatan yang tidak terlaksana. Pada indikator memberikan kritikan kurangnya keikutsertaan masyarakat Pada indikator memberikan saran kurangnya partisipasi masyarakat. Keempat, pada aspek Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan di ketahui pada indikator pemanfaatan hasil pembangunan belum meningkatnya kualitas perencanaan. Pada indikator memelihara hasil pembangunan dalam pelaksanaan program masyarakat menumbuhkan rasa saling peduli. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbagi menjadi dua faktor penghambat adalah kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya sumbangan pemikiran, kurangnya pendidikan masyarakat, kurangnya motivasi, kurangnya pengawasan, pelaksanaan pembangunan yang belum baik, kurangnya pemanfaatan hasil

pembangunan dan kurangnya pemeliharaan hasil pembangunan di desa. Sedangkan faktor pendukung adalah adanya sumbangan barang dari masyarakat dan adanya sebagian sumbangan tenaga oleh masyarakat. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Simpang Bumbuan Kecamatan Tebing tinggi Kabupaten Balangan disarankan kepada Kepala Desa agar memberikan pendekatan personal, Aparat desa hendaknya dapat berkoordinasi secara bijaksana dengan cara mengajak masyarakat, Warga masyarakat dapat bekerjasama dengan pemerintah desa.

2. Muhtardin (2021) dalam penelitian yang berjudul “**Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu Tahun 2020**”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tahun 2020 di Desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan rumusan masalah yang diajukan yaitu bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) Desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu serta apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) Desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dimana cara yang digunakan untuk memecahkan sebuah masalah yaitu dengan cara mengumpulkan, menyusun, menjelaskan, menganalisis serta mengumpulkan data dari objek yang sedang diteliti, dalam hal ini teknik yang digunakan yaitu dengan cara wawancara yang

dilakukan kepada pihak yang dianggap penting. Jadi data penelitian ini didapatkan dari wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa Tembalae, Sekretaris Desa, Ketua BPD, 2 Staf Desa dan 4 tokoh masyarakat serta 5 tokoh pemuda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah pembangunan Desa Tembalae tahun 2020 sudah ada namun belum maksimal di sebabkan karena pemerintah Desa Tembalae belum sepenuhnya melibatkan semua elemen masyarakat dengan adanya hambatan dari kurangnya kesadaran, tingkat pendidikan masyarakat, kesibukan dan dampak pandemi Covid-19 serta masih kurangnya komunikasi dari pemerintah Desa Tembalae kepada masyarakat. Adapun hal ini meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu Tahun 2020, pemerintah Desa Tembalae harus mensosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat mengenai jadwal dan tujuan diadakannya musyawarah perencanaan pembangunan (musrembangdes), pemerintah Desa Tembalae harus menyesuaikan dalam hal penetapan hari pelaksanaan musrembangdes tidak bertepatan dengan kesibukan masyarakat dengan aktivitas pekerjaan supaya masyarakat yang hadir lebih banyak saat musrembangdes serta masyarakat Desa Tembalae juga harus menyadari akan pentingnya menjalin komunikasi, berpartisipasi dan bekerja sama dalam perencanaan serta penetapan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu.

Partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam keberhasilan pembangunan desa, yang menjadi fokus penelitian Tita Fusvita (2020),

Muhtardin (2021), dan penelitian skripsi ini. Persamaan ketiga penelitian terletak pada pengakuan bahwa keterlibatan masyarakat sangat menentukan efektivitas pembangunan, baik dalam proses musyawarah, pelaksanaan, maupun pemanfaatan hasil pembangunan. Ketiga penelitian sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis partisipasi masyarakat, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Namun, terdapat perbedaan yang signifikan di antara ketiganya, terutama terkait tahap partisipasi yang diteliti. Penelitian Tita Fusvita (2020) menekankan partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan hasil pembangunan, di mana warga terlibat melalui kontribusi uang, tenaga, dan barang, namun masih terbatas dalam pengawasan dan penyampaian aspirasi. Penelitian Muhtardin (2021) fokus pada keikutsertaan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), dengan hambatan utama berupa kurangnya kesadaran warga, tingkat pendidikan, kesibukan, dampak pandemi Covid-19, dan komunikasi pemerintah desa yang terbatas. Berbeda dengan kedua penelitian terdahulu, penelitian skripsi ini menekankan partisipasi masyarakat sejak tahap perencanaan pembangunan desa, yaitu bagaimana warga dilibatkan dalam Musrenbangdes sejak awal penyusunan rencana pembangunan, serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Dari perbedaan tersebut muncul kebaruan (novelty) penelitian skripsi. Dengan menempatkan fokus pada tahap perencanaan, penelitian ini menganalisis partisipasi secara lebih strategis dan komprehensif, tidak

hanya pada pelaksanaan atau musyawarah saja. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi peran masyarakat dari awal hingga akhir siklus pembangunan, sehingga hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi yang lebih efektif bagi pemerintah desa dalam mendorong keterlibatan warga secara transparan dan inklusif.

Dengan demikian, penelitian skripsi ini menempati posisi yang lebih strategis dibanding penelitian terdahulu. Fokus pada tahap perencanaan dan penggunaan teori yang komprehensif memberikan kontribusi baru bagi pengembangan model pembangunan partisipatif di tingkat desa, sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah desa dalam merancang proses perencanaan yang lebih efektif, berkelanjutan, dan melibatkan masyarakat secara maksimal.

B. Tinjauan Teoritis

1. Pengertian Pelayanan Publik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (dalam Mustanir 2022:19) pelayanan adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain.

Menurut Sabir dkk, (dalam Mustanir 2022:19) Pelayanan publik adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administrasi yang telah disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu setiap instansi penyelenggara Negara, Korporasi, Lembaga

Independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lainnya yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik . Kegiatan itu dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan semua yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan Tindakan atau serangkaian Tindakan pelayanan publik

Pengertian pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah suatu kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa, dan atau pelayanan **administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public.** Pelayanan publik tersebut bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kualitas kehidupan warga negara. Selain itu, penyelenggaraan pelayanan publik harus dilaksanakan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Definisi pelayanan publik Menurut para ahli (dalam Mustanir 2022:19) sebagai berikut :

- 1) Menurut Dwiyanto Pelayanan publik adalah serangkaian aktivitas-aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh birokrasi publik guna memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksudkan disini adalah warga negara yang membutuhkan peralatan publik.
- 2) Menurut Sinambela, pelayanan publik merupakan pemberian layanan (melayani) keperluan masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah

ditetapkan.

- 3) Menurut Mahmudi, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Menurut Siriattakul dkk, (dalam Mustanir 2022:21) Pelayanan publik merupakan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam hal memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public yaitu setiap institusi penyelenggaraan Negara, korporasi, Lembaga independent yang telah dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk hanya semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja didalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

2. Partisipasi

a. Pengertian Partisipasi

Menurut Kamus bahasa Indonesia (1996:56), definisi partisipasi adalah: "Hal yang berkenaan dengan turut serta dalam suatu kegiatan atau berperan serta dalam suatu kegiatan. Jadi, dapat diartikan bahwa partisipasi adalah suatu bentuk kerjasama

yang diberikan apabila suatu pihak sedang melakukan suatu kegiatan". Dengan keterlibatan dirinya, berarti keterlibatan pikiran dan perasaannya. Misalnya berpartisipasi/ikut serta (dapat anda rasakan sendiri), maka anda melakukan kegiatan itu karena menurut pikiran anda perlu dan bahwa perasaan pun menyetujui untuk melakukannya. Partisipasi tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencerminkan adanya kesadaran dan kemauan dari individu untuk terlibat secara aktif.

Menurut Isbandi dkk, (dalam Mustanir dkk, 2022 : 32) partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Adapun pengertian partisipasi berdasarkan para ahli:

Menurut Prasadja (dalam Agustina, 2022 : 34) Partisipasi sebagai bentuk kontribusi terorganisasi yang dilakukan masyarakat untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan umum pemerintah. Posisi pemerintah dan masyarakat adalah setara dan saling membutuhkan satu sama lain atau sering dikenal dengan hubungan kemitraan.

Menurut Theresia dkk (dalam Rizal, 2022: 56) mengartikan Partisipasi sebagai tindakan untuk mengambil bagian yaitu kegiatan

pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat.

b. Bentuk Partisipasi

Bentuk-bentuk partisipasi merupakan unsur-unsur dalam mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Adapun bentuk-bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat dalam tahap pembangunan, Menurut Cohen dan Uphoff (dalam Irene, 2015:61) yaitu :

1) Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi jenis ini berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi jenis ini sangat penting karena masyarakat menurut ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Adapun wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini bisa bermacam-macam seperti: hadir rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

2) Partisipasi dalam Pelaksanaan

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur partisipasi masyarakat adalah partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan ini lebih menekankan pada keterlibatan masyarakat secara langsung dalam bentuk materi umumnya bersifat pada wujud dan terlihat jelas seperti partisipasi dalam bentuk uang, sumbangan tenaga dan barang untuk pelaksanaan suatu pembangunan.

3) Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil

Partisipasi jenis ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kuantitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output. Sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat seberapa besar presentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau tidak. Partisipasi masyarakat desa dalam pemanfaatan hasil pembangunan desa juga dilihat dari keikutsertaan masyarakat di dalam memanfaatkan, memelihara, dan melestarikan hasil-hasil pembangunan desa yang ada.

4) Partisipasi dalam Evaluasi

Partisipasi jenis ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan.

Adapun menurut Dusseldorp (dalam Kumiyati 2019:55) mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa:

- a) Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat;
- b) Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok;
- c) Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain;
- d) Menggerakkan sumberdaya masyarakat;

- e) Mengambil bagian dari dalam proses pengambilan keputusan:
- f) Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakat.

c. Tingkat Partisipasi

Tingkat partisipasi masyarakat adalah derajat keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, hingga evaluasi kegiatan. Tingkat partisipasi menunjukkan seberapa besar masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat, berkontribusi dalam pengambilan keputusan, serta berperan aktif dalam pelaksanaan program pembangunan. Tingkatan partisipasi masyarakat sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan perlu diketahui oleh agen pembangunan. Oleh karena itu, indikator dalam mengevaluasi tingkat partisipasi masyarakat penting dipahami secara benar. Sementara Wilcox (dalam Theresia 2014:202) mengemukakan adanya 5 (lima) tingkatan partisipasi, yaitu:

1. Memberikan informasi (*information*)
2. Konsultasi (*consultation*), yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan balik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut.
3. Pengambilan keputusan bersama (*deciding together*), dalam arti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta mengembangkan peluang yang diperlukan.

4. Bertindak bersama (*acting together*), dalam arti tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatan.
5. Memberikan dukungan (*supporting independent community interest*); dimana kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasihat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

Dari kelima tingkatan partisipasi di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya diukur dari kehadiran dalam kegiatan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga pemberian dukungan terhadap program pembangunan. Semakin tinggi tingkat keterlibatan masyarakat, maka semakin besar pula rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keberhasilan program pembangunan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas masyarakat serta kemitraan antara pemerintah dan warga menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Menurut Slamet, (2014:97) untuk faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologi

seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan dan penghasilan.

2. Faktor Eksternal

Menurut Sunarti dalam jurnal tata lokal, (2013:9), faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan stakeholder, yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program ini. Stakeholder kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program.

d. **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Partisipasi**

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan partisipasi adalah unsur-unsur atau kondisi tertentu yang dapat memperkuat atau melemahkan keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan pembangunan. Faktor-faktor ini menentukan sejauh mana masyarakat mau dan mampu ikut serta secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembangunan. Menurut Slamet (dalam Theresia 2014:207) menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu:

- 1) Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat, untuk berpartisipasi.
- 2) Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi.
- 3) Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

Dengan demikian, keberhasilan partisipasi masyarakat sangat bergantung pada sejauh mana kesempatan, kemauan, dan kemampuan masyarakat difasilitasi serta dikembangkan dalam proses pembangunan. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar utama dalam menciptakan partisipasi yang efektif dan berkelanjutan.

e. Faktor Penghambat Partisipasi

Faktor penghambat partisipasi adalah segala bentuk kondisi, keadaan, atau situasi yang menyebabkan masyarakat tidak dapat atau enggan terlibat secara aktif dalam proses pembangunan. Faktor-faktor ini dapat berasal dari dalam diri masyarakat sendiri maupun dari lingkungan luar yang memengaruhi perilaku partisipatif. Menurut Soetrisno (dalam Theresia 2014:211) mengidentifikasikan beberapa masalah berkaitan dengan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yakni:

- 1) Masalah pertama dan terutama dalam pengembangan partisipasi masyarakat adalah belum dipahaminya makna sebenarnya tentang partisipasi oleh pihak perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
 - a) Pada tataran perencanaan pembangunan, partisipasi didefinisikan sebagai kemauan masyarakat untuk secara penuh mendukung pembangunan yang direncanakan dan ditetapkan sendiri oleh (aparatur) pemerintah, sehingga masyarakat bersifat pasif dan hanya sebagai sub-ordinasi pemerintah.

- b) Pada pelaksanaan pembangunan di lapangan, pembangunan yang dirancang dan ditetapkan oleh pemerintah didefinisikan sebagai kebutuhan masyarakat, sedangkan yang dirancang dan ditetapkan masyarakat didefinisikan sebagai keinginan masyarakat yang memperoleh prioritas lebih rendah.
 - c) Partisipasi masyarakat, sering didefinisikan sebagai kerjasama pemerintah dan masyarakat yang tidak pernah memperhatikan adanya sub-sistem yang disubordinasikan oleh supra-sistem, dan aspirasi masyarakat cukup diakomodasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- 2) Masalah kedua adalah dengan dikembangkannya pembangunan sebagai ideologi baru yang harus diamankan dengan dijaga ketat, yang mendorong aparat pemerintah bersifat otoriter.
 - 3) Masalah ketiga adalah banyaknya peraturan yang meredam keinginan masyarakat untuk berpartisipasi.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat merupakan cerminan dari masih rendahnya pemahaman dan penerapan prinsip pembangunan partisipatif. Kondisi tersebut menegaskan perlunya upaya perbaikan dalam sistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, agar masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek aktif dalam proses pembangunan. Melalui peningkatan kesadaran, komunikasi yang terbuka, serta penguatan kapasitas masyarakat dan aparat desa,

diharapkan partisipasi masyarakat dapat berkembang secara lebih bermakna dan berkelanjutan.

3. Masyarakat

a. Pengertian Masyarakat

Istilah “masyarakat” berasal dari bahasa Arab, yakni berasal dari kata syaraka yang berarti “ikut serta, berpartisipasi.” Sementara di bahasa Inggris, istilah “masyarakat” disebut dengan *society* yang berasal dari kata latin *socius* berarti “kawan.” Menurut penelitian dari UIN Suska (2020).

Selo Soemardjan (1962) mengemukakan bahwa “Masyarakat adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan tertentu.”

Koentjaraningrat, ahli antropologi Indonesia, (dalam buku Pengantar Ilmu Antropologi Cetakan Kesembilan, 2002:150) , menyebutkan definisi masyarakat adalah “sekelompok manusia yang saling bergaul atau dengan istilah lain saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai persamaan melalui apa warga-warganya dapat saling berinteraksi.”

Menurut Paul B. Harton. (dalam latif, dkk 2023:116) Menyatakan bahwa pengertian masyarakat adalah sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri, yang hidup bersama-sama yang cukup lama, yang mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok itu.

Menurut Abdul Syani (dalam latif, dkk 2023:116) menyatakan bahwa pengertian masyarakat adalah berkumpul, bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi.

b. Bentuk-Bentuk Masyarakat

Menurut Seom ardjan (dalam Seokanto 2013:49), masyarakat di Indonesia dibagi menjadi tiga kategori yakni masyarakat sederhana, masyarakat madya dan masyarakat pra-modern atau masyarakat modern. Adapun ciri-ciri utama dari masyarakat-masyarakat tersebut, adalah sebagai berikut:

1) Masyarakat Sederhana

- a) Hubungan dalam keluarga dan dalam masyarakat setempat sangat kuat.
- b) Organisasi sosial pada pokoknya didasarkan atas adat istiadat yang terbentuk menurut tradisi.
- c) Kepercayaan kuat kepada kekuatan-kekuatan gaib yang mempengaruhi kehidupan manusia, akan tetapi tidak dapat dikuasi olehnya, tidak ada lembaga-lembaga khusus untuk memberi pendidikan dalam bidang teknologi, keterampilan diwariskan oleh orang tua kepada anak sambil berpraktek dengan sedikit teori dan pengalaman dan tidak dari hasil pemikiran atau eksperimen .
- d) Tingkat buta huruf relatif tinggi.
- e) Hukum yang berlaku tidak tertulis, tidak kompleks dan pokok-pokoknya diketahui dan ditahan oleh hampir semua warga masyarakat yang sudah dewasa.

- f) Ekonominya sebagian besar meliputi produksi untuk keperluan keluarga sendiri atau untuk para pasaran kecil setempat, sedangkan uang sebagai alat penukaran dan alat pengukur harga berperan secara terbatas sekali.
- g) Kegiatan ekonomi dan sosial yang memerlukan kerjasama orang banyak dilakukan secara tradisional dengan gotong royong tanpa hubungan kerja antar buruh dengan majikan.

2) Masyarakat Madya

- a) Hubungan keluarga tetap kuat, akan tetapi hubungan dengan masyarakat setempat sudah mulai mengendor dan menunjukkan gejala-gejala hubungan atas dasar perhitungan ekonomi.
- b) Adat-istiadat masih dihormati, akan tetapi sikap masyarakat mulai terbuka bagi pengaruh dari luar.
- c) Dengan timbulnya rasionalitas dalam cara berfikir maka kepercayaan pada kekuatan-kekuatan gaib baru timbul apabila orang sudah kehabisan akal untuk menanggulangi suatu masalah.
- d) Di dalam masyarakat timbul lembaga-lembaga pendidikan formal sampai tingkat sekolah lanjutan pertama, akan tetapi masih jarang sekali adanya lembaga pendidikan keterampilan atau kejuruan.
- e) Tingkat buta huruf relatif turun.
- f) Hukum tertulis mulai mendampingi hukum tidak tertulis.
- g) Ekonomi masyarakat memberi kesempatan lebih banyak kepada produksi buat pasaran, dan mulai menimbulkan diferensiasi dalam struktur masyarakat, dan uang semakin meningkat peranannya.

- h) Gotong royong tradisional tinggal untuk keperluan sosial dikalangan keluarga besar dan tetangga, akan tetapi golong royong untuk keperluan umum dilakukan atas dasar upah.

3) Masyarakat Pra Modern Modern

- a) Hubungan antar manusia terutama didasarkan atas kepentingan-kepentingan pribadi.
- b) Hubungan dengan masyarakat-masyarakat lain di lakukan secara terbuka dalam suasana saling pengaruh-mempengaruhi, kecuali (mungkin) dalam penjagaan rahasia penemuan-penemuan baru.
- c) Kepercayaan kuat pada manfaat dan pengetahuan dan teknologi sebagai sarana untuk senantiasa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d) Masyarakat digolongkan menurut bermacam-macam profesi serta keahlian yang masing-masing dapat dipelajari dan ditingkatkan dalam lembaga-lembaga pendidikan keterampilan dan kejuruan.
- e) Tingkat pendidikan formal adalah tinggi dan merata.
- f) Hukum yang berlaku pada pokoknya hukum tertulis yang sangat kompleks.
- g) Ekonomi hampir seluruhnya merupakan pasaran yang didasarkan atas penggunaan uang dan alat-alat pembayaran lain. Demikian pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan interaksi yang dilakukan oleh sekelompok manusia yang telah bermukim dan bekerja sama dalam suatu wilayah (tempat) tertentu.

Serta terdapat nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi patokan dalam berperilaku.

4. Perencanaan

a. Pengertian Perencanaan

Perencanaan (*planning*) dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasikan untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu (dalam Baskoro, dkk 2021:18).

Perencanaan menurut para ahli (dalam Baskoro, dkk 2021:18-19) sebagai berikut:

1. Menurut Ery Sunary, Perencanaan adalah suatu proses penentuan tujuan organisasi dan kemudian menyajikan dengan jelas strategi, taktik, kebijakan, tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh.
2. Menurut Barbara Becker, Perencanaan adalah suatu cara rasional untuk mempersiapkan masa depan.
3. Menurut Jacqueline Alder, Pengertian perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.
4. Menurut John Douglas, definisi perencanaan adalah suatu proses kontinyu dari pengkajian, membuat tujuan dan sasaran, dan mengimplementasikan serta mengevaluasi atau mengontrolnya.
5. Menurut Steiner, pengertian perencanaan adalah suatu proses memulai dengan sasaran-sasaran, perasaan strategi, kebijakan, dan

rencana terperinci untuk mencapainya, merupakan organisasi untuk menerapkan keputusan, dan termasuk tinjauan kerja dan umpan balik terhadap pengalaman siklus perencanaan baru.

b. Asas-Asas Perencanaan

1. *Principle of contribution to objective* (asas tujuan) Setiap perencanaan dan segala perubahan harus ditunjukkan kepada pencapaian tujuan.
2. *Principle of efficiency of planning* (asas perencanaan efisiensi) Jika perencanaan itu untuk pelaksanaannya memerlukan suatu biaya, tenaga, dan waktu yang sekecil-kecilnya, tetapi membawa hasil yang lebih besar, maka perencanaan itu dapat dikatakan efisien.
3. *Principle of primacy of planning* (asas pengutamaan perencanaan) Perencanaan merupakan fungsi dari manajemen yang harus lebih dahulu dikerjakan, karena perencanaan dapat mempermudah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya seperti fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan, fungsi penyusunan, fungsi pengawasan, fungsi pengendalian, dan fungsi perumusan kebijaksanaan.
4. *Principle of pervasiveness of planning* (asas pemerataan perencanaan) Asas pemerataan perencanaan memegang peranan penting mengingat pemimpin pada tingkat tinggi banyak mengerjakan perencanaan dan bertanggung jawab atas berhasilnya rencana itu.

5. *Principle of planning premise* (asas pokok perencanaan) Pokok–pokok perencanaan sangat berguna bagi rencana, sebab premis–premis perencanaan dapat menentukan kegiatan yang akan datang.
6. *Principle of policy frame work* (asas kebijaksanaan pokok kerja kebijaksanaan) Menunjukkan pada garis–garis besar, prosedur–prosedur kerja dan program–program kerja tersusun.
7. *Principle of timing* (asas waktu) Adalah penentuan waktu yang tepat, singkat dan jelas.
8. *Principle of planning communication* (asas tata hubungan perencanaan) Perencanaan dapat disusun serta dilaksanakan dengan baik, jika setiap orang bertanggung jawab terhadap aktivitasnya dan memperoleh penjelasan yang memadai mengenai bidang yang akan dikerjakannya.

Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip perencanaan seperti *principle of contribution to objective, efficiency of planning, primacy of planning, pervasiveness of planning, planning premise, policy framework, timing*, dan *planning communication* merupakan landasan fundamental dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif dan terarah. Implementasi prinsip-prinsip tersebut secara konsisten tidak hanya menjamin efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya, tetapi juga memastikan keselarasan antara tujuan, kebijakan, penentuan waktu, serta koordinasi antar pelaksana, sehingga mampu menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan dan tepat sasaran. Selain itu, penerapan prinsip perencanaan yang komprehensif mendorong keterpaduan antara perencanaan di tingkat kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Hal ini penting untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan dalam proses pembangunan serta meningkatkan akuntabilitas dan kualitas hasil pembangunan secara keseluruhan..

5. Pembangunan

Pembangunan menurut para ahli (dalam afni, dkk 2024 :1-3) sebagai berikut :

- a. Menurut W.W. Rostow, pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam suatu garis lurus, yakni dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Pembangunan pada mulanya ditujukan dalam arti pertumbuhan ekonomi yang dicapai melalui usaha-usaha industrialisasi dan modernisasi. Dalam perkembangannya, definisi tersebut kemudian meluas mencakup pula perbaikan-perbaikan dalam bidang sosial, politik, dan kebudayaan sehingga menjadi pembangunan sebagai suatu proses multidimensional.
- b. Menurut Pontoh dan Kustiwan mendefinisikan pembangunan adalah suatu proses perubahan yang dilakukan melalul upaya-upaya se cara sadar dan terencana, sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan.
- c. Menurut Kartz mengartikan pembangunan sebagai perubahan yang lebih luas dari masyarakat terhadap suatu keadaan kehidupan yang kurang bernilai kepada keadaan yang lebih bernilai.
- d. Menurut Subandi, Pembangunan diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan. Setiap orang atau kelompok orang tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik, bahkan sempurna, dari keadaan yang sebelumnya. Untuk mewujudkan harapan ini, tentu harus mendatangkan suatu perencanaan.

Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Penamaan kerangka pemikiran bervariasi, kadang disebut juga kerangka konsep, kerangka teoritis atau model teoritis (*theoretical model*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa bersama masyarakat memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) sebagai pedoman pembangunan desa. Proses perencanaan pembangunan tersebut harus dilaksanakan secara partisipatif melalui musyawarah desa (Musdes) agar pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, prioritas, serta potensi yang dimiliki desa.

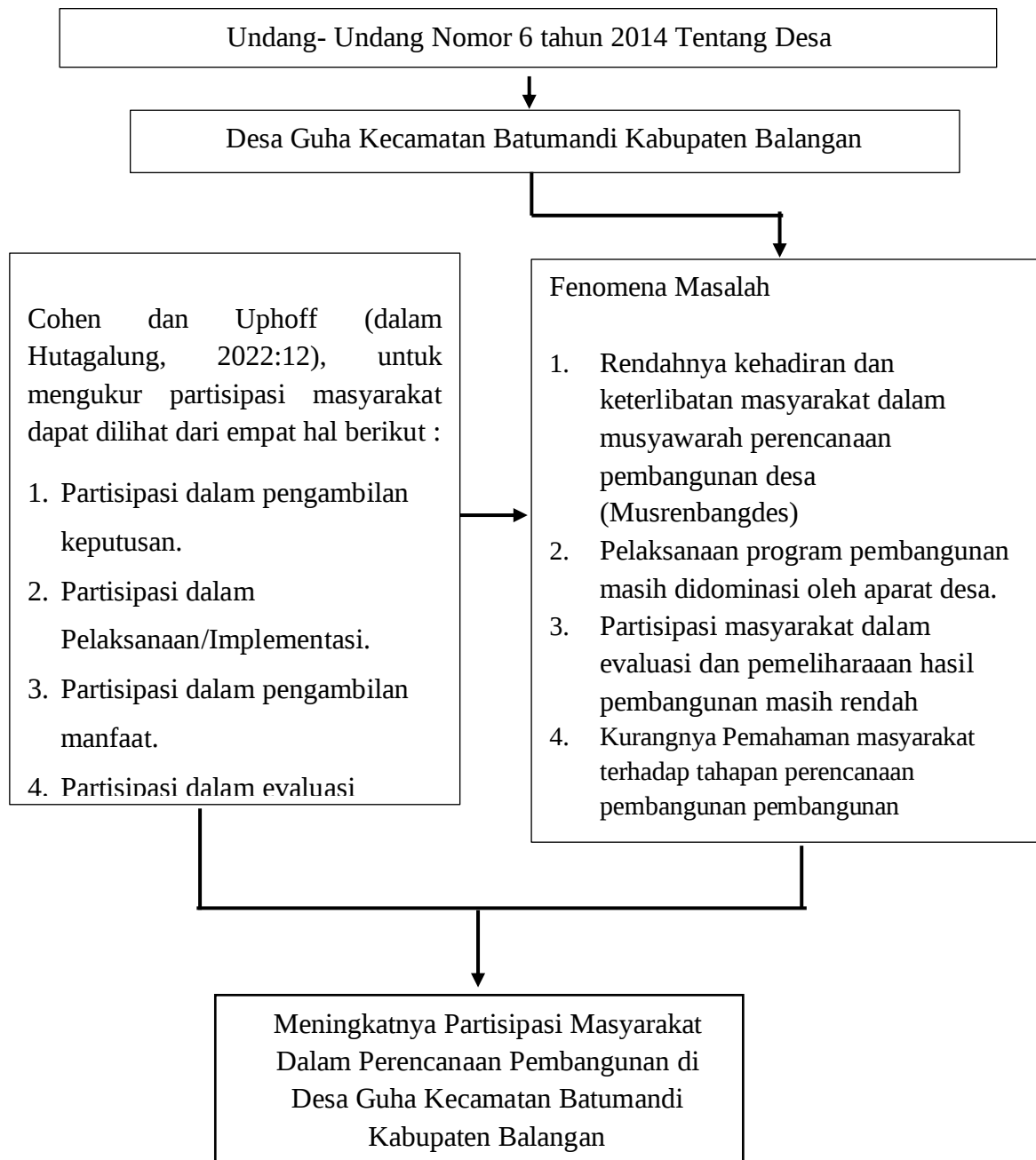
Realitas yang terjadi di Desa Guha, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa belum berjalan secara optimal. Keterlibatan masyarakat cenderung bersifat formalitas, yang terbatas pada kehadiran fisik dalam forum musyawarah tanpa diikuti kontribusi yang signifikan dalam pengambilan keputusan. Proses musyawarah perencanaan pembangunan sering kali didominasi oleh aparat desa dan tokoh tertentu, sehingga aspirasi masyarakat

secara luas belum sepenuhnya terakomodasi. Selain itu, rendahnya tingkat sosialisasi, terbatasnya akses informasi, serta kurangnya kesadaran dan inisiatif masyarakat untuk menyampaikan aspirasi maupun berperan dalam evaluasi pembangunan turut berkontribusi pada hasil pembangunan yang belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan prioritas warga.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip ideal partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa dan praktik di lapangan. Berdasarkan konsep partisipasi masyarakat menurut Cohen dan Uphoff (dalam Hutagalung, 2022:12), kondisi di Desa Guha mencerminkan rendahnya partisipasi masyarakat pada keempat dimensi partisipasi, yaitu pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya kehadiran masyarakat dalam Musrenbangdes, dominasi aparat desa dalam pelaksanaan pembangunan, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam evaluasi dan pemeliharaan hasil pembangunan..

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan desa melalui penguatan kapasitas warga, peningkatan komunikasi dan kepemimpinan pemerintah desa, serta perbaikan mekanisme musyawarah yang lebih terbuka dan inklusif. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa Guha, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan diharapkan meningkat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Guha Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan objek penelitian ini adalah Desa Guha Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 71663.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian, penting bagi peneliti untuk memilih pendekatan yang tepat agar mampu memahami secara mendalam permasalahan yang dikaji, serta dapat merumuskan langkah-langkah strategis dalam mencari solusi. Sejalan dengan maksud dan tujuan penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Menurut Sugiyono (2018;213) metode pendekatan kualitatif adalah metode pendekatan yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekan pada makna. Metodologi pendekatan kualitatif bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau obyek penelitian melalui aktivitas sosial, sikap dan persepsi orang secara individu atau kelompok.

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berusaha menggali dan memahami secara mendalam bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Guha Kecamatan Batumandi Kabupaten

Balangan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menelusuri proses, makna, dan pengalaman yang dialami baik oleh pemerintah desa sebagai penyelenggara pembangunan maupun masyarakat sebagai subjek sekaligus objek pembangunan.

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi secara nyata di lapangan terkait tingkat, bentuk, dan faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berhenti pada deskripsi mengenai partisipasi, tetapi juga berusaha menggali kendala yang dihadapi serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa secara lebih optimal.

C. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana pendekatan yang digunakan berfokus pada pemahaman secara mendalam terhadap fenomena sosial atau perilaku manusia melalui pengumpulan data non-numerik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi, menjelaskan, serta menggambarkan pengalaman dan interpretasi individu maupun kelompok dalam konteks partisipasi masyarakat pada perencanaan pembangunan desa.

Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini meliputi observasi, wawancara, serta dokumentasi. Melalui metode tersebut, peneliti memperoleh wawasan mengenai bagaimana pemerintah desa maupun

masyarakat memahami, merasakan, serta berperan dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Guha Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan. Data yang terkumpul lebih menekankan pada informasi berbentuk tulisan maupun lisan.

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang diteliti sesuai dengan keadaan objek yang sebenarnya. Dengan tipe penelitian ini, diharapkan peneliti mampu mendeskripsikan berbagai bentuk partisipasi masyarakat, dan faktor mempengaruhi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Dengan demikian, penelitian deskriptif kualitatif ini berfokus pada partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Guha Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan.

D. Data dan Sumber Data

Berdasarkan sifat atau wujudnya, data dalam penelitian diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif (Hardani et al., 2020: 246). Penelitian ini menggunakan data kualitatif sebagai jenis data utama, karena fokus penelitian diarahkan untuk memahami secara mendalam fenomena partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Data kualitatif tidak dinyatakan dalam bentuk angka, melainkan berupa kata-kata, uraian, dan penjelasan yang menggambarkan kondisi, proses, serta makna dari suatu peristiwa sosial. Menurut Hardani et al. (2020: 167), data kualitatif

disajikan dalam bentuk teks naratif yang menekankan pada aspek kualitas, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual terhadap realitas sosial berdasarkan perspektif subjek penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini data yang digunakan bersumber dari data primer dan data sekunder yang saling melengkapi.

1. Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan yang akan ditentukan melalui Teknik *purposive sampling* melalui pedoman wawancara, observasi, atau survei yang dilakukan di lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Data Sekunder pada penelitian ini adalah data penunjang yang merupakan data pendukung data primer yang diperoleh dari data-data resmi yang didapat terhadap objek yang diteliti berasal dari Kantor Desa Guha Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan.

2. Sumber Data

Pada penelitian tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Guha Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, penentuan informannya menggunakan Teknik *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan salah satu teknik *non-*

random sampling, di mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri atau kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian, sehingga informan yang dipilih diharapkan mampu memberikan informasi yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian. Menurut Sugiyono (2010: 32), *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh bersifat *representatif*. Dengan demikian, penggunaan teknik *purposive sampling* dalam penelitian ini dinilai tepat karena memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih terarah, fokus, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Informan dalam penelitian ini adalah narasumber yang dimintai keterangan berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Informan penelitian dipilih dari orang-orang yang mengetahui dan memahami pokok permasalahan yang diteliti, sehingga diharapkan mampu memberikan informasi yang akurat dan relevan. Informan tersebut diharapkan dapat memberikan data secara objektif, netral, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun informan dalam penelitian ini berasal dari perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua RT, tokoh masyarakat, Ketua Karang Taruna, serta masyarakat Desa Guha Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan. Secara keseluruhan, jumlah informan dalam penelitian ini terdiri dari 13 orang, di antaranya

Tabel 3.1

Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Jumlah
1.	Ahmad Rajib	Kepala Desa	1 Orang
2.	Ridha Ansyar	Sekretaris Desa	1 Orang
3.	Norliani, S.Pd	Kaur Umum & Perencanaan	1 Orang
4.	Misrawati	Sekretaris BPD	1 Orang
5.	Bahri	Anggota BPD	1 Orang
6.	Hasran	Ketua RT. 01	1 Orang
7.	Pansi	Ketua RT. 02	1 Orang
8.	Hendri Putra Faridana	Ketua Karang Taruna	1 Orang
9.	Salman	Tokoh Masyarakat	1 Orang
10.	Abdul Halim	Tokoh Masyarakat	1 Orang
11.	Maria Ulfah	Kader Desa	1 Orang
12.	Misran	Masyarakat	1 Orang
13.	Helma Sari	Masyarakat	1 Orang
Jumlah			13 Orang

Pemilihan tiga belas informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan pertimbangan bahwa seluruh informan merupakan pihak yang paling mengetahui, terlibat, dan merasakan langsung proses perencanaan pembangunan di Desa Guha Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan. Kepala Desa, Sekretaris Desa, serta Kaur Umum dan Perencanaan dipilih karena berperan penting dalam penyusunan RKPDes,

pelaksanaan Musrenbangdes, penentuan prioritas, dan pengambilan keputusan pembangunan. Sekretaris dan anggota BPD dipilih karena berfungsi mengawasi perencanaan serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Ketua RT 01 dan RT 02 dipilih karena dekat dengan masyarakat dan memahami tingkat partisipasi warga. Ketua Karang Taruna mewakili perspektif pemuda, tokoh masyarakat dipilih karena pengaruh dan keterlibatannya dalam musyawarah desa, kader desa karena perannya dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan, serta unsur masyarakat untuk menggambarkan pengalaman dan partisipasi warga secara langsung. Komposisi informan ini memungkinkan diperolehnya gambaran partisipasi masyarakat secara komprehensif sesuai fokus penelitian.

E. Desain Operasional Penelitian

Desain operasional penelitian adalah unsur penelitian yang memberitahu informasi bagaimana cara mengukur suatu variabel atau informasi ilmiah yang akan membantu peneliti lain yang menggunakan variabel yang sama. Desain operasional merupakan semacam petunjuk tentang bagaimana mengukur suatu variabel, jumlah variabel yang ditetapkan untuk diteliti. Berdasarkan informasi tersebut maka peneliti akan mengetahui bagaimana caranya melakukan pengukuran terhadap variabel.

Penelitian ini berfokus pada partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Guha Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan. Untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat, peneliti menggunakan teori Cohen dan Uphoff (dalam Hutagalung, 2022:12), yang membagi partisipasi

ke dalam empat dimensi utama, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat, dan partisipasi dalam evaluasi.

Tabel 3.2
Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Cohen dan Uphoff (dalam Hutagalung, 2022:12), untuk mengukur partisipasi masyarakat dapat dilihat dari empat hal berikut:	1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan	a. Kehadiran dalam musyawarah perencanaan b. Memberikan pendapat atau usulan dalam rapat
	2. Partisipasi dalam Implementasi	a. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan b. Kontribusi tenaga atau dana dalam pelaksanaan program
	3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat	a. Menjaga hasil pembangunan b. Memelihara hasil pembangunan
	4. Partisipasi dalam evaluasi	a. Memberikan saran atau kritik terhadap hasil pembangunan b. Mengikuti kegiatan evaluasi atau rapat pertanggungjawaban.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2023:296) “merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data”. Tanpa mengetahui Teknik

pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

1. Observasi

Menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2023:297), ‘observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi’. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda diruang angkasa) dapat di observasi dengan jelas.

Menurut Rachmawati (dalam Hasanah, dkk : 2022:107) observasi dibedakan menjadi observasi partisipan dan nonpartisipan. Observasi partisipan dilakukan dengan melibatkan peneliti secara langsung dalam kegiatan subjek penelitian sehingga peneliti dapat merasakan dan memahami pengalaman sumber data secara lebih mendalam. Sebaliknya, observasi nonpartisipan dilakukan tanpa keterlibatan langsung peneliti, di mana peneliti hanya mengamati, mendengar, dan mencatat fenomena yang terjadi, kemudian menganalisisnya untuk menarik kesimpulan sesuai tujuan penelitian.

2. Wawancara

Esterberg (dalam Sugiyono, 2023:304) ‘merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu’.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.

3. Dokumentasi

Dokumen menurut Sugiyono (2023:314) “merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang”. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Sugiyono (2023:320) bersifat induktif, yaitu suatu proses analisis yang didasarkan pada data yang diperoleh di lapangan, kemudian dikembangkan menjadi hipotesis.

Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan dari data tersebut, peneliti selanjutnya kembali mencari dan mengumpulkan data secara berulang-ulang untuk memperkuat temuan penelitian. Proses ini dilakukan secara terus-menerus hingga diperoleh kejelasan apakah hipotesis yang dirumuskan dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Apabila data yang diperoleh secara berulang-ulang melalui teknik triangulasi menunjukkan hasil yang konsisten dan mendukung hipotesis, maka hipotesis tersebut dapat diterima dan selanjutnya berkembang menjadi suatu teori. Dengan demikian, analisis data kualitatif tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan fenomena, tetapi juga untuk membangun pemahaman dan konsep baru yang bersumber dari data lapangan. Aktivitas dalam analisis data kualitatif meliputi *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*, yang dilakukan secara saling berkaitan dan berkesinambungan hingga data dinyatakan jenuh dan kesimpulan penelitian dapat ditarik secara kredibel.

Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2023:321) mengemukakan bahwa analisis data kualitatif merupakan proses yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga data mencapai titik kejenuhan. Proses analisis ini tidak dilakukan secara terpisah dari pengumpulan data, melainkan berjalan secara bersamaan sejak awal penelitian sampai penelitian berakhir. Dengan demikian, peneliti dapat memahami data secara lebih mendalam dan menyeluruh.

Aktivitas data dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Sugiyono (2023:323) mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2023:325) menyatakan *'the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative tex'*. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan tek yang bersifat naratif.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Sugiyono (2023:329-330) kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

H. Uji Kredibilitas Data

Uji kredibilitas data adalah proses pengujian yang dilakukan untuk menilai kebenaran, keakuratan, dan keabsahan data yang diperoleh oleh peneliti melalui analisis kualitatif. Kredibilitas hasil penelitian akan terlihat apabila partisipan atau informan menyatakan bahwa transkrip penelitian, temuan, atau interpretasi yang disajikan benar-benar mencerminkan pengalaman, pandangan, dan realitas yang mereka alami sendiri. Dengan kata lain, data dianggap kredibel jika mampu menggambarkan secara akurat kondisi atau pengalaman yang sebenarnya terjadi, sehingga hasil penelitian dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Uji kredibilitas menurut Sugiyono (2020:189) pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Teknik yang digunakan dalam penelitian studi kasus ini, yaitu :

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dapat dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sumber bisa berasal dari wawancara dan observasi bisa juga dengan dokumen-dokumen tertulis, catatan maupun foto.

b. Triangulasi Metode

Triangulasi metode yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik

yang berbeda, data diperoleh dengan wawancara, kemudian di cek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner.

Menurut Sugiyono (2023:365-371) uji kredibilitas data menunjukkan kepercayaan terhadap data penelitian kualitatif, hal ini dilakukan sebagai berikut:

- 1) Perpanjangan pengamatan
Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru.
- 2) Meningkatkan ketekunan
Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.
- 3) Triangulasi
Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.
- 4) Analisis kasus negatif
Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Analisis kasus negative berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.
- 5) Menggunakan bahan referensi
Bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti.
- 6) Mengadakan *member check*
Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti berarti datanya tersebut valid.

Penelitian ini menggunakan empat teknik uji kredibilitas data, yaitu perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, dan *member check*, yang diterapkan secara langsung di lapangan. Perpanjangan pengamatan

dilakukan dengan cara peneliti berada di lokasi penelitian dalam waktu yang cukup serta melakukan kunjungan berulang ke Desa Guha untuk mengamati proses perencanaan pembangunan dan mengonfirmasi kembali informasi kepada informan. Peningkatan ketekunan diterapkan melalui pengamatan yang cermat, rinci, dan berkesinambungan terhadap setiap data yang diperoleh, disertai pencatatan sistematis dan perbandingan data antarwaktu dan antar-informan. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber, seperti perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga, serta dari berbagai teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, termasuk pencocokan dengan dokumen resmi desa. Selanjutnya, *member check* dilakukan dengan mengonfirmasi kembali hasil wawancara dan temuan penelitian kepada informan untuk memastikan kesesuaian data dengan maksud dan pengalaman informan. Penerapan keempat teknik tersebut secara konsisten dinilai telah memadai untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Anonim. Peraturan Desa Guha Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Mencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjm Desa) Tahun 2019-2027
- Afni, Nur, dkk. 2024. Buku Ajar Pendidikan IPS SD. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Ahmad Mustanir. 2022. *Pelayanan Publik*. Pasuruan: Qiara Media
- Basrowi dan Suwandi. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta : Rineka Cipta.
- Dalimoenthe, Ikhlasih. 2022. *Pengantar Ilmu Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Febriana, Kharisma Ayu. 2023. *Komunikasi, Perubahan Sosial, Model Difusi Inovasi dalam Pengembangan Desa Wisata Kampung Jarui Semarang, Jawa Tengah*. Sleman : Bintang Semesta Media
- Fusvita, Tita, 2020. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Simpang Bumbuan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu
- Harun, Rochajat dan Ardianto Elvinaro. 2012. *Komunikasi Pembangunan & Perubahan Sosial; Perspektif Dominan, Kaji Ulang dan Teori Kritis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Husen, Umar. 2003. *Business an Introduction*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Latif, Mukhtar Latif, dkk. 2019. *Adat Bersendi Syara Syara Bersendi Kitabullah(Syara Mengato Adat Memakai)*. Jambi: Salim Media.
- Mulyadi. 2021. *Buku Ajar Pengantar Manajemen*. Indramayu : Penerbit Adab.
- Muhtardin, 2021, *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)) Desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu Tahun 2020* Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataraman
- Priatna, Isep Amas, dkk. 2025. *Pembangunan Daerah*. Bandung: Widina Media Utama.

Putra, Dwi Fauzia, dkk. 2019. *Co-Management dalam Pengelolaan Hutan, Studi: Desa Giripurno, Kota Batu, Jawa Timur*. Malang: MNC.

Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sugiyono, 2022. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2023. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Theresia 2014. *Pembangunan berbasis masyarakat*. Bandung: Alfabeta

Tumpe, Miswar, dkk. 2021. *Pengelolaan Potensi Desa "Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Makasar: Tohar Media.